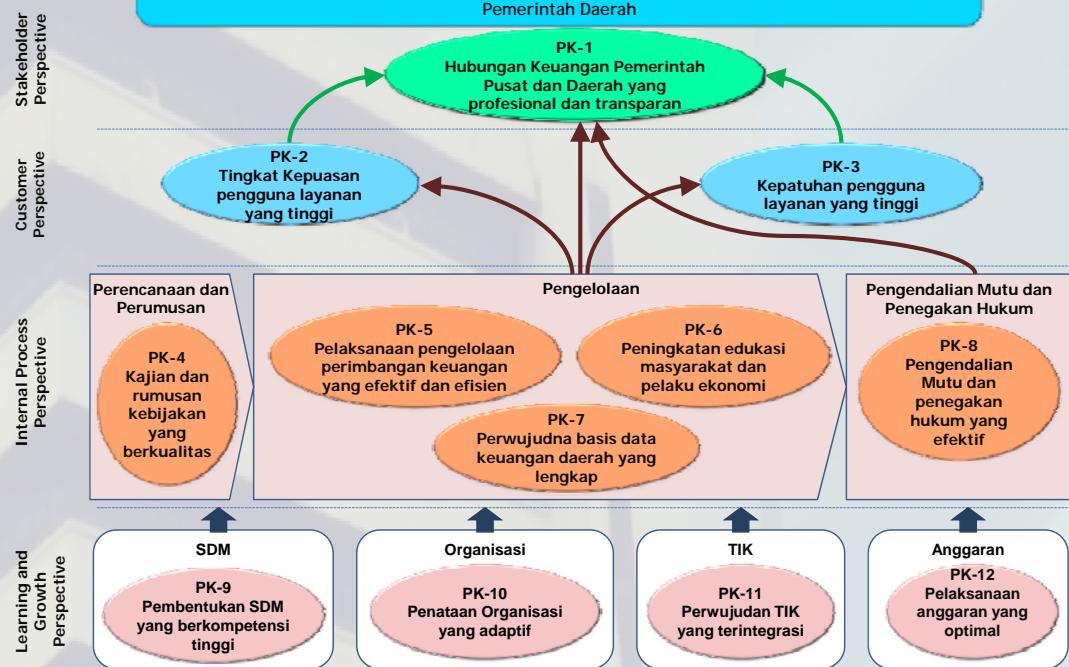




KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

VISI
Menjadi unit organisasi yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Kode	Uraian IKU	Target 2013
PK-1.1	Indeks pemerataan keuangan antar daerah*	0,76
PK-1.2	Persentase Ketepatan Jumlah Penyaluran Transfer ke daerah*	100%
PK-1.3	Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan *	93%
PK-1.4	Persentase penyelesaian <i>detail design</i> E-SIKD	100%
PK-1.4	Persentase ketepatan waktu pemberian persetujuan atas defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman	100%
PK-2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan *	4,08
PK-3.1	Persentase penyampaian APBD tepat waktu *	97%
PK-4.1	Persentase realisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah tepat waktu	100%
PK-5.1	Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan	100%
PK-6.1	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	82
PK-7.1	Persentase ketersediaan informasi keuangan daerah sesuai rencana	100%
PK-8.1	Persentase pengenaan sanksi terhadap daerah yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku	100%
PK-8.2	Persentase Pemda yang menetapkan Perda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)	70%

Kode	Uraian IKU	Target 2013
PK-8.3	Indeks Opini BPK atas BA 999.05*	4
PK-8.4	Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden	80
PK-9.1	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	87%
PK-9.2	Persentase pegawai yang memenuhi standar jumlah *	50%
PK-10.1	Nilai reformasi birokrasi*	92
PK-10.2	Persentase <i>policy recommendation</i> hasil pengawasan yang ditindaklanjuti*	90%
PK-10.3	Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko*	55 (risk defined)
PK-11.1	Persentase akurasi data SIMPEG*	100%
PK-11.2	Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis	80%
PK-11.3	Persentase pertukaran data oleh unit eselon I	90%
PK-12.1	Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)	95%
PK-12.2	Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA*	98%